



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, berkat anugerah-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 yang merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026. Renja Perubahan ini dilakukan guna mengoptimalkan kembali baik pelaksanaan maupun realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah berjalan di tahun 2023, untuk lebih dimaksimalkan kembali dengan adanya perbaikan – perbaikan baik dari segi uraian kegiatan, indikator maupun dari segi anggarannya. Sehingga melalui Renja Perubahan ini, dijadikan acuan Perangkat Daerah untuk memaksimalkan pelaksanaan dan realisasi kinerja kegiatan selanjutnya.

Palu, 9 Mei 2022

**Pih. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



SALIM, S.Sos.,M.Si

Pembina Tkt. I

NIP. 19721212 200012 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2023	
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
BAB IV PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sd. Triwulan I Tahun 2023	6
Tabel 2.2	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	11
Tabel 3.1	Rencana Kerja (Renja) Perubahan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan dokumen rencana pembangunan yang penyusunannya masih berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini dijadikan sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan salah satu instrumen untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2023 yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian dan realisasi kinerja Perangkat Daerah serta capaian dan realisasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah tercapai.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen Perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Inspektorat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dimaksudkan untuk :

1. Menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah;
2. Menjamin keterpaduan arah kebijakan dan strategis RPJMD serta keselarasan program dan kegiatan dalam rencana strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya;
3. Sebagai alat untuk mengukur kinerja Instansi.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 bertujuan :

1. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;
2. Memaksimalkan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun berjalan 2023 sehingga bisa lebih optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2023

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan I, yang memuat target capaian / realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indicator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam table matrik perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SD. TRIWULAN I TAHUN 2023

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan yang menghambat pelaksanaan pembangunan tersebut. Dalam dokumen Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 yang dilaksanakan memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang diaplikasikan dalam rencana kerja (Renja) setiap tahunnya.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan I Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH SD. TRIWULAN I TAHUN 2023

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sd. Triwulan I Tahun 2023	
						Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp
1	2				3	4		5		6	
	6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH						
1	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Nilai	74	21.102.671.294	-	2.721.136.267
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85		-	
						Persentase Realisasi Anggaran	%	98		14,19	
	6	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	129.860.850	1	2.844.850
	6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	127.016.000	0
	6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Laporan	2	2.844.850	1
	6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	Dokumen	2	17.378.230.578	1,25
	6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Org/Bln	110	17.224.350.578	110
	6	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan SKPD	Laporan	1	153.880.000	1
	6	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	84.610.000	0,25
	6	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	1	84.610.000	0,25
	6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen	1	700.381.850	-
	6	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	100.200.000	0,25

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sd. Triwulan I Tahun 2023	
							Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4		5		6	
6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	26	538.844.350	12	71.710.000	
6	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	740	61.337.500	360	360.000	
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	4	616.294.950	1,75	113.430.520	
6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.810.550	1	0	
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	39.324.400	0,25	7.643.150	
6	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	umlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	245.000.000	0,50	61.250.000	
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	326.160.000	0,25	44.537.370	
6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	480.369.016	1	476.464.000	
6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	104	480.369.016	104	476.464.000	
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	1.530.684.050	0,50	287.865.732	
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1	343.020.900	0,25	54.891.982	
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	1.187.663.150	0,25	232.973.750	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sd. Triwulan I Tahun 2023		
						Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4		5		6		
	6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	182.240.000	0,75	10.318.000
	6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	13	120.450.000	13	143.000
	6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	63	51.790.000	16	925.000
	6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	Unit	2	10.000.000	2	9.250.000
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	%	77	5.201.076.000	-	1.058.150.000
							Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	%	88		-	
							Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat	%	80		-	
							Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	%	64,10		28,21	
	6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan	605	4.883.326.000	344	1.042.250.000
	6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	214	2.062.800.000	40	190.430.000
	6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	309	1.473.110.000	298	809.220.000
	6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	Laporan	4	40.950.000	2	7.200.000
	6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	Laporan	68	209.700.000	2	14.400.000
	6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal	Kesepakatan	1	245.346.000	1	-
	6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi TLHP	Dokumen	9	851.420.000	1	21.000.000

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sd. Triwulan I Tahun 2023		
						Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4		5		6		
	6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	16	317.750.000	3	15.900.000
	6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Laporan	2	40.000.000	-	-
	6	01	02	1.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	14	277.750.000	3	15.900.000
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level	3	495.600.000	-	22.500.000
	6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Laporan	1	6.500.000	-	-
	6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rekomendasi	1	6.500.000	-	-
	6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	Laporan	51	489.100.000	1	22.500.000
	6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	49	169.950.000	48	22.500.000
	6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Kegiatan	2	259.150.000	-	-
	6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	1	60.000.000	-	-
Jumlah								%	100	26.799.347.294	14,19	3.801.786.267

Reviu hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun 2023 memperlihatkan yakni bahwa pencapaian realisasi anggaran/keuangan program/ kegiatan/ sub.kegiatan mencapai 14,19%, namun untuk pencapaian kinerjanya hampir sudah dilaksanakan secara keseluruhan, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian realisasi anggaran maupun kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak optimal yakni :

1. Kegiatannya telah dilaksanakan sesuai dengan waktu pelaksanaan, namun keterlambatan dalam melakukan administrasi proses keuangannya, sehingga mempengaruhi capaian realisasi;
2. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dikarenakan kegiatan tersebut menyesuaikan pada Pedoman Juknis dari Pusat;
3. Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya berdasarkan pengaduan masyarakat;
4. Untuk beberapa capaian program belum dapat di persentasekan ataupun dinilai pada triwulan I, namun untuk kinerjanya sudah dilaksanakan dan berproses sejak triwulan I.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SD. TRIWULAN I TAHUN 2023

NO.	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021 (n-2)	TAHUN 2022 (n-1)	TAHUN 2023 (n)	TAHUN 2024 (n+1)	TAHUN 2021 (n-2)	TAHUN 2022 (n-1)	TAHUN 2023 (n)	TAHUN 2024 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks 60	Indeks 62	Indeks 64	Indeks 66	Indeks 60	Indeks 66,77	-	-	Fokus item Penilaian terdiri dari Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2.	Persentase nilai SAKIP perangkat daerah dengan kategori A			2,80% (1 PD)	10,42% (5 PD)	33,33% (16 PD)	41,67% (20 PD)	2,80% (1 PD)	18,75% (9 PD)	-	-	Realisasi = PD dg nilai SAKIP A/Jum.PD x 100% (2021 : 1 PD/48 PD x 100%); (2022 : 9 PD/48 PD x 100%)

NO.	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS TAHUN 2021 (n-2)
				TAHUN 2021 (n-2)	TAHUN 2022 (n-1)	TAHUN 2023 (n)	TAHUN 2024 (n+1)	TAHUN 2021 (n-2)	TAHUN 2022 (n-1)	TAHUN 2023 (n)	TAHUN 2024 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			Level 3 (Nilai 3,10)	Level 3 (Nilai 3,20)	Level 3 (Nilai 3,40)	Level 3 (Nilai 3,50)	Level 3 (Nilai 3,10)	Level 3 (Nilai 3,20)	-	-	Fokus Penilaian Maturitas SPIP terdiri dari Maturitas Penyelenggaraan SPIP (bagian dari Level Kapabilitas APIP), Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Selain evaluasi capaian Renja sampai dengan triwulan I Tahun 2023 di atas, dapat dilihat juga capaian Indikator Kinerja Utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun rekomendasi dan catatan pada Renja Perubahan, yakni :

1. Perbaiki Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari segi uraian dan target satuan.
2. Perbaiki dan penyesuaian point 1 berdasarkan pada hasil desk perbaikan Perjanjian Kinerja, maupun desk pada evaluasi dokumen SAKIP.

Implikasi yang ditimbulkan dari beberapa perbaikan di atas, diharapkan mempengaruhi capaian kinerja menjadi lebih maksimal, baik dari segi capaian realisasi maupun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatannya, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB III
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyusun rencana kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 ini dalam 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan total anggaran Renja sebelum Perubahan yakni sebesar Rp. 22.348.274.818,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 26.779.347.294,- berdasarkan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2023.

TABEL 3.1
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DAN PENDANAAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023											
NO	SEBELUM PERUBAHAN					SESUDAH PERUBAHAN					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks 64	18.541.300.480	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Sakip Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Nilai 74	21.102.671.294	
								Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks 85		
								Persentase Realisasi Anggaran	% 98		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Nilai 74	81.113.450	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok 3	129.860.850	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok 6	79.148.450	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok 1	127.016.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap 4	1.965.000	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap 2	2.844.850	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran	% 98	15.002.154.818	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Keuangan	Dok 2	17.378.230.578	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Org/Bln 115	14.848.274.818	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Org/Bln 110	17.224.350.578	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap 2	153.880.000	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap 1	153.880.000	

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	SEBELUM PERUBAHAN					SESUDAH PERUBAHAN					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	L a p 2	76.710.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	L a p 1	84.610.000	
	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	L a p 2	76.710.000	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	L a p 1	84.610.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks 85	824.716.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Doc 1	700.381.850	
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Provinsi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	D o c 2	84.600.000	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Provinsi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Doc 1	100.200.000	
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kab. dan luar daerah lainnya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	O r a n g 20	680.116.000	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kab. dan luar daerah lainnya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Org 26	538.844.350	
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi	Jumlah Orang yang mengikti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	O r a n g 850	60.000.000	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi	Jumlah Orang yang mengikti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Org 740	61.337.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	L a p 4	497.598.921	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Lap 4	616.294.950	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	P a k e t 1	5.810.846	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pkt 1	5.810.550	

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	SEBELUM PERUBAHAN					SESUDAH PERUBAHAN					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pkt 1	13.483.075	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pkt 1	39.324.400	
	- Penyediaan Bahan/Material	Provinsi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pkt 1	195.000.000	- Penyediaan Bahan/Material	Provinsi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pkt 1	245.000.000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap 1	283.305.000	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap 1	326.160.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lap 1	567.142.650	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lap 1	480.369.016	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit 1	567.142.650	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit 104	480.369.016	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lap 2	1.311.004.641	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lap 2	1.530.684.050	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Lap 12	342.455.256	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Lap 1	343.020.900	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Lap 1	968.549.385	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Lap 1	1.187.663.150	

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	SEBELUM PERUBAHAN					SESUDAH PERUBAHAN					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	L a p 3	180.860.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lap 3	182.240.000	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	U n i t 1	129.300.000	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit 13	120.450.000	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	U n i t 1	41.560.000	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	U n i t 63	51.790.000	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Gedung yang dipelihara	U n i t 3	10.000.000	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	U n i t 2	10.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	% 77	3.188.093.275	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	% 77	5.201.076.000	
			Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	% 88				Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	% 88		
			Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat	% 80				Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat	% 80		
			Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	% 64,10				Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	% 64,10		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	L a p 452	2.996.995.775	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan Pengawasan Internal	Lap. 605	4.883.326.000	
	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	L a p 48	115.158.000	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Lap. 214	2.062.800.000	

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	SEBELUM PERUBAHAN					SESUDAH PERUBAHAN					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Lap. 192	455.478.625	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Lap. 309	1.473.110.000	
	- Reviu Laporan Kinerja	Prov. Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Lap. 170	756.410.700	- Reviu Laporan Kinerja	Prov. Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Lap. 4	40.950.000	
	- Reviu Laporan Keuangan	Prov.Kab /Kota	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Lap. 49	943.103.450	- Reviu Laporan Keuangan	Prov.Kab /Kota	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Lap. 68	209.700.000	
	- Kerjasama Pengawasan Internal	-	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Kesepakatan 1	-	- Kerjasama Pengawasan Internal	Provinsi	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Kesepakatan 1	245.346.000	
	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Prov. Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APIP	Dok 33	726.845.000	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Prov. Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APIP	Dok 9	851.420.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Lap 18	191.097.500	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Lap. 16	317.750.000	
	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah yang ditangani	Lap. 8	56.797.500	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah yang ditangani	Lap 2	40.000.000	
	- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Lap 10	134.300.000	- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Lap. 14	277.750.000	

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	SEBELUM PERUBAHAN					SESUDAH PERUBAHAN					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	L e v e l 3	618.881.063	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	L e v e l 3	495.600.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	L a p 1	36.346.900	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Lap 1	6.500.000	
	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Provinsi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan yang disusun	Rekomendasi 1	36.346.900	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Provinsi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan yang disusun	Rekomendasi 1	6.500.000	
	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	L a p 63	582.534.163	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	Lap 51	489.100.000	
	- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	P D 48	300.375.525	- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PD 49	169.950.000	
	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	K e g 11	248.020.638	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Keg. 2	259.150.000	
	- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	P D 4	34.138.000	- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD 1	60.000.000	
					22.348.274.818					26.779.347.294	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini merupakan perbaikan dari Rencana Kerja (Renja) Murni Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini meliputi perbaikan Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Renja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Melalui Renja Perubahan ini, diharapkan bisa lebih optimal dalam hal pelaksanaannya serta capaian realisasi dan kinerjanya, serta selaras dengan Renstra Inspektorat daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021- 2026.

Palu, 9 Mei 2022

**Pih. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



SALIM, S.Sos.,M.Si
Pembina Tkt. I
NIP. 19721212 200012 1 004